

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang termasuk rawan bencana. Berbagai ancaman seperti gempa bumi, tsunami, banjir, kekeringan dan tanah longsor, kebakaran lahan, kegagalan teknologi maupun ancaman kerusuhan sosial.

Daerah rawan tsunami membentang disepanjang pantai selatan Kabupaten Kebumen, terutama di wilayah yang terdapat muara sungai seperti pantai Suwuk kecamatan Puring, Tanggulangin kecamatan Klirong dan Wiromartan Kecamatan Mirit. Banjir dan tanah longsor juga merupakan ancaman yang cukup besar di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Kebumen diantaranya kecamatan Ayah, Puring, Buayan, Adimulyo, Sempor, Karangsembung, Alian, Karanggayam dan sebagian di wilayah Kecamatan Padureso. Selain banjir yang diakibatkan genangan, wilayah Kabupaten Kebumen juga memiliki 2 waduk yang besar yang memiliki potensi bencana yang cukup tinggi yaitu waduk Sempor dan Wadaslintang. Selain bencana yang disebabkan karena, Kabupaten Kebumen juga memiliki potensi terjadinya konflik sosial diantaranya yaitu permasalahan lahan Urut Sewu.

Pengelolaan bencana di Kabupaten Kebumen masih banyak menemui permasalahan, yaitu :

1. Penanggulangan bencana yang masih didominasi oleh kegiatan tanggap darurat saja;
2. Masih bertumpu kepada peran dan kemampuan pemerintah daerah;
3. Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait, Badan Usaha Pemerintah maupun swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat (LMS), organisasi kemasyarakatan, media massa serta masyarakat belum terlaksana dengan baik;
4. Keterpaduan antara pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan belum terlaksana dengan baik, dilihat dari belum masuknya Rencana Penanggulangan Bencana kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
5. Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Perangkat Daerah terkait belum mengarah kepada pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana.

Pelaksanaan Penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen sudah mempunyai wadah yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana pada pasal 18 ayat 1 menjelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Atas dasar itulah maka, Pemerintah Kabupaten Kebumen membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kebumen, yaitu dengan dikeluarkannya peraturan daerah Kabupaten Kebumen Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Kebumen. Selain itu peraturan daerah yang dijadikan sebagai aturan dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen sudah diterbitkan yaitu melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen adalah dokumen perencanaan Program dan Kegiatan selama lima tahun sebagai dasar pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD yang bersifat indikatif, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Kebumen disusun dengan menganalisa hasil capaian kinerja renstra periode sebelumnya dan disesuaikan dengan kondisi terkini tentang potensi, peluang, dan tantangan yang sedang dihadapi oleh Perangkat Daerah serta disesuaikan dengan mempertimbangkan prioritas dan isu strategis pada BPBD Kabupaten Kebumen, BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

B. Landasan Hukum.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kebumen Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Kebumen;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 43);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010-2015;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Rencana Strategis BPBD Kabupaten Kebumen 2016–2021 adalah sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016 – 2021. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Strategis Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai pedoman dalam mencapai target yang termuat dalam RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan;
2. Memberikan arah kebijakan sekaligus acuan kerja bagi BPBD Kabupaten Kebumen dalam mewujudkan visi dan misi daerah;
3. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) terkait konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pada BPBD Kabupaten Kebumen;

4. Memudahkan Seluruh jajaran pada BPBD Kabupaten Kebumen untuk mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.

D. Sistematika Penulisan.

Renstra BPBD Kabupaten Kebumen disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB 1 : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Landasan Hukum
 - C. Maksud dan Tujuan
 - D. Sistematika Penulisan
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
- A. Struktur Organisasi dan Tupoksi Perangkat Daerah
 - B. Sumber Daya Perangkat Daerah
 - C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH
- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - B. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)
 - C. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
 - D. Penentuan Isu Strategis
- BAB IV : VISI, MISI ,TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
- A. Visi
 - B. Misi
 - C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - D. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Perangkat Daerah
- BAB V : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF.
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VII : PENUTUP
- A. Pedoman Transisi
 - B. Kaidah Pelaksanaan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

A. SOTK Perangkat Daerah (Struktur Organisasi dan tupoksi Perangkat Daerah)

I. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen terdiri dari :

a. Kepala

Kepala BPBD Kabupaten Kebumen secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

b. Unsur Pengarah

Unsur Pengarah terdiri atas :

- 1) Ketua yang dijabat oleh Kepala BPBD.
- 2) Anggota yang terdiri dari 5 (lima) anggota dari pejabat instansi/lembaga pemerintah terkait dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional.

c. Unsur Pelaksana.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

Susunan Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kebumen

b. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- 2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari :

- 1) Seksi Pencegahan
- 2) Seksi Kesiapsiagaan

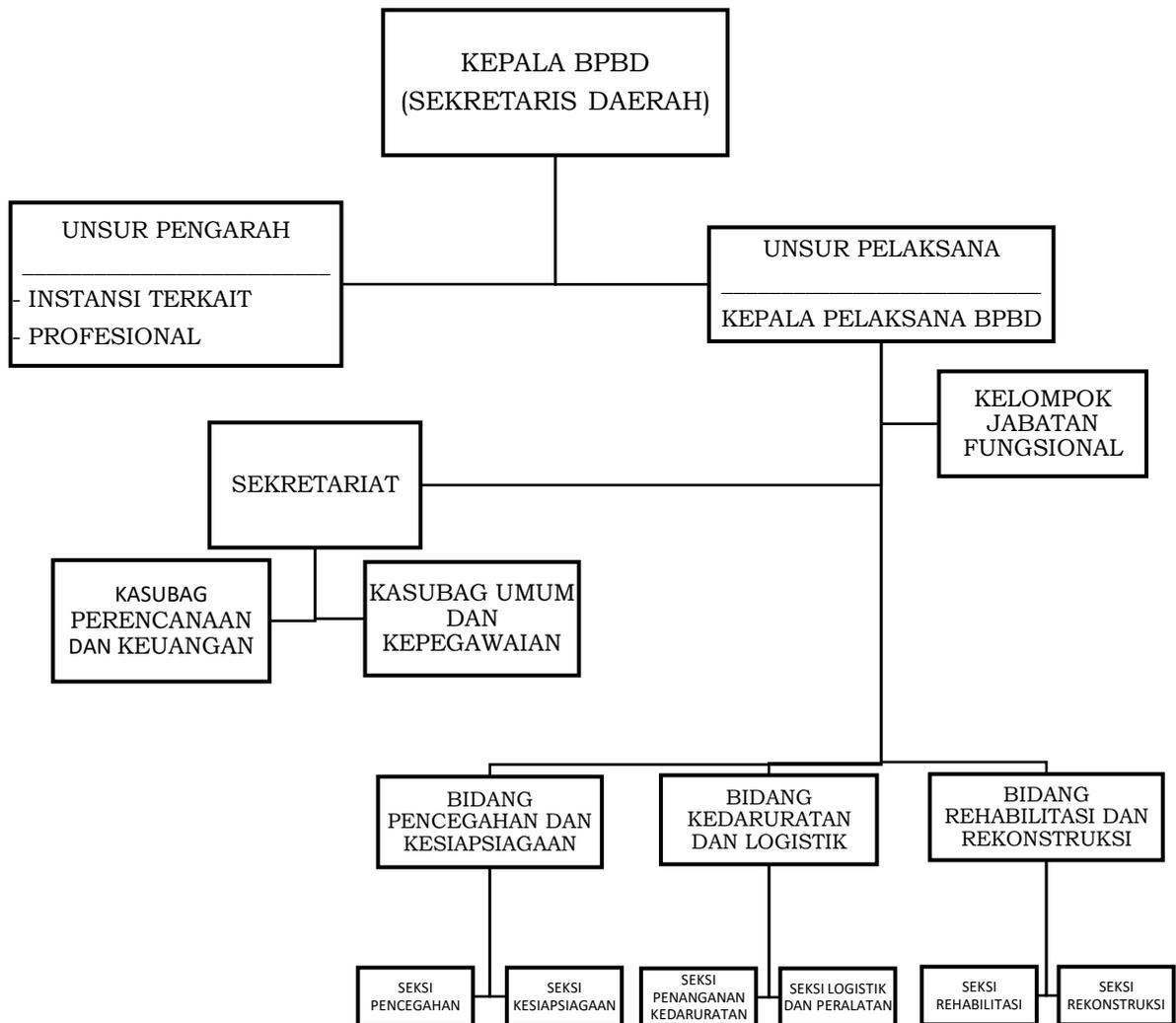
d. Bidang Kedaruratan dan Logistik terdiri dari:

- 1) Seksi Penanganan Kedaruratan
- 2) Seksi Logistik dan peralatan

e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri dari

- 1) Kepala Seksi Rehabilitasi
- 2) Kepala Seksi Rekonstruksi

Struktur organisasi BPBD Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar.1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Kebumen

II. Tugas Pokok

BPBD Kabupaten Kebumen merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang Penanggulangan bencana yang dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 tahun 2010. BPBD Kabupaten Kebumen mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana,

- penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 3. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 5. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 6. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 7. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 8. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya; dan
 9. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok Perangkat Daerah, BPBD Kabupaten Kebumen berfungsi sebagai :

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;
2. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan di lingkungan Sekretariat BPBD;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penanggulangan bencana; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Sumber Daya Perangkat Daerah

I. Lingkungan Kerja /kondisi alam.

Topografi wilayah Kabupaten Kebumen yang memiliki pegunungan, dataran rendah, dan pantai, menyebabkan potensi bencana yang ada juga semakin besar. Kebumen yang berbatasan dengan Samudera India juga memiliki risiko bencana tsunami yang tinggi. Berdasarkan indeks risiko bencana yang di rilis oleh BNPB pada tahun 2013, Kabupaten Kebumen menempati peringkat ke 49 dari 496 yang di Indonesia. Kejadian bencana tanah longsor, banjir, dan kekeringan juga semakin sering terjadi, memerlukan sinergitas program/kegiatan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kebumen dan Perangkat Daerah lain yang bisa turut berperan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Kondisi alam Kabupaten Kebumen sebagaimana peta berikut :

II. Sumberdaya Manusia

Dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Penanggulangan Bencana di Kebumen, jumlah pegawai yang tersedia sejumlah 29 personil, yang terdiri dari sekretariat dengan 2 sub bagian, 3 bidang yang masing-masing terdiri dari 2 kepala seksi, serta PUSDALOP Penanggulangan Bencana, sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 2.1. Sumberdaya Perangkat Daerah

ESE-LON	BERDASAR GOLONGAN						BERDASAR PENDIDIKAN						DIKLAT YG DIKUTI		
	IV	III	II	I	NON PNS	JML	S2	S1	SMA	SMP	SD	JML	STRUKTURAL	FUNGSIONAL	JML
Es.II	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	0	1
Es.III	4	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	4	0	4
Es.IV	1	7	-	-	-	8	1	7	-	-	-	8	7	0	7
STAF	-	7	8	1	-	16	-	5	9	2	-	16	0	0	0
JML	6	14	8	1	-	29	1	17	9	2	0	29	12	0	12
% dari JML	20,6	48,3	27,5	3,4	0	100	3,4	58,6	31	6,9	0	100	41,37	0	41,37

Berdasarkan analisa kebutuhan pegawai dengan tupoksi, maka kebutuhan ideal pegawai pada BPBD Kabupaten Kebumen sejumlah 32 PNS dan 26 orang pegawai non PNS sejumlah 26 orang untuk Staf PUSDALOPS Untuk itu maka secara bertahap diperlukan penambahan pegawai guna pelaksanaan tugas secara optimal.

III. Perlengkapan

Sarana dan Prasarana yang dimiliki/dipergunakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen untuk mendukung pelaksanaan tugas pelayanan penanggulangan bencana, sebagai berikut :

Tabel 2.2. Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah

JENIS SARPRAS	KONDISI				Kebutuhan jangka 5 th	Perlu penam bahan	Perlu pemeliharaan /peremajaan
	Baik	Rsk ring	Rsk berat	jml			
Gedung	3	1	0	4	7	3	1
Gedung kantor	0	1	0	1	1	0	1
Gudang Logistik	0	0	0	0	1	1	0
Gedung POS Pembantu	3	0	0	3	0	0	0
Mushola	0	0	0	0	1	1	0
Kendaraan Darat dan Air	27	13	3	43	65	28	36
Mobil jabatan	1	1	0	2	2	0	1
Mobil operasional double cabin / 4WD	1	0	0	1	2	1	1
Mobil operasional station	1	0	0	1	2	1	1
Mobil pick up	2	0	0	2	2	0	2
Damkar	5	0	1	6	0	0	0
Truk tanki	2	4	0	6	16	10	6
Truk serbaguna	1	0	0	1	1	0	1
Sepeda motor jabatan	7	2	0	9	14	5	9
Trail	2	2	0	4	8	4	4
Motor roda 3	0	0	0	0	1	1	0
Perahu karet	2	2	1	5	8	3	5
Mesin perahu	3	2	1	6	9	3	6
Peralatan Kantor	45	1	8	54	80	26	53
Komputer PC	15	0	2	17	20	3	17
Laptop/Note book	12	0	2	14	20	6	14
LCD Proyektor	1	0	2	3	7	4	3
Kamera DSLR	1	0	0	1	5	4	0
Lensa Tele	0	0	0	0	1	1	0

Printer dot matrik	3	0	0	3	4	1	3
printer laserjet	4	0	0	4	5	1	4
printer deskjet	8	0	2	10	15	5	10
Sound system	1	1	0	2	3	1	2
Sarpras / Perlengkapan Kantor	7	1	0	8	79	71	6
AC	5	1	0	6	12	6	6
Referigerator	0	0	0	0	2	2	0
Tangga lipat	0	0	0	0	2	2	0
korden	1	0	0	1	2	1	0
rak Perahu	0	0	0	0	1	1	0
Rak mesin	1	0	0	1	2	1	0
Rak peralatan	0	0	0	0	9	9	0
Loker	0	0	0	0	4	4	0
pigura	0	0	0	0	25	25	0
Jam Dinding	0	0	0	0	20	20	0
Meubelair kantor	169	11	6	186	205	20	148
Meja/kursi eselon II	1	0	0	1	1	0	1
Meja/Kursies elon III/IV	11	1	0	12	12	0	12
Meja kerja staf	29	1	0	30	30	0	30
Kursi kerja Staf	23	0	5	28	28	0	18
Kursi rapat	65	5	0	70	70	0	65
Siches/sofa Tamu	0	2	1	3	4	0	3
Almari arsip	21	2	0	23	28	10	10
filing cabinet	10	0	0	10	20	10	0
Locker	9	0	0	9	12	0	9
Sarpras Kebencanaan (Evakuasi)	219	59	5	283	434	157	175
Modular Office	1	0	0	1	1	0	0
EWS tsunami	9	0	0	9	13	4	9
DVB BMKG	1	0	0	1	1	0	1
Genset	4	1	0	5	5	0	5
Chain SAW	5	0	0	5	8	3	0
Water Treathment	1	0	0	1	1	0	1

Dapur Umum	6	0	0	6	6	0	6
Breathing aparatus	1	2	0	3	24	21	10
Compresor BA	0	0	0	0	1	1	1
SCUBA	2	0	0	2	5	3	4
Teropong Medan	0	0	0	0	4	4	0
Drak Bar	9	0	0	9	9	0	8
Drak Bar Tube	0	0	0	0	4	4	0
Tenda Pengungsi	1	0	5	6	6	5	6
Tenda Peleton	2	0	0	2	4	2	2
Tenda Posko	3	0	0	3	6	3	3
Tenda Regu	3	0	0	3	3	0	3
Tenda Keluarga	10	0	0	10	10	0	10
Jaket Pelampung	25	0	0	25	64	39	0
Radio RIG	4	0	0	4	5	1	4
Handy Talky /HT	120	50	0	170	200	30	100
GPS location	1	0	0	1	3	3	0
Torpedo Buoy	0	0	0	0	24	24	0
Papan Rescue	0	0	0	0	8	8	0
Pompa Apung	1	1	0	2	4	2	2
Pompa AIR	10	5	0	15	15	0	0

Berdasarkan Data peralatan/ sarpras yang di miliki oleh BPBD Kabupaten Kebumen maka, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Untuk Pengurangan Risiko Bencana Tsunami, dibutuhkan EWS Tsunami sebanyak 13 unit, sedangkan sampai saat ini baru tersedia 9 unit, maka perlu di tambah ketersediaan Menara EWS Tsunami sebanyak 4 unit.
- 2) Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka Droping Air bersih diperlukan truk tanki 16 unit, sehinga diperlukan penambahan truk tanki sejumlah 10 unit.
- 3) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan petugas SAR dan Rescue maka peralatan penyelamatan korban bencana juga perlu untuk selalu di tambah jumlahnya.

C. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BPBD Kabupaten Kebumen telah melakukan berbagai dalam upaya melakukan pengurangan risiko bencana periode 2010 – 2015 antara lain adalah :

i. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam rangka kegiatan PraBencana, upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) melalui kegiatan Pencegahan, Kesiapsiagaan yaitu dengan pelaksanaan program /kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Terbangun 3 POS BPBD di kecamatan Gombang, petanahan dan Prembun.
- b. Tersusunnya Peta risiko bencana di 6 kecamatan yaitu: Buayan, Ayah, Rowokele, Gombang, Kuwarasan dan Puring.
- c. Terbentuknya 15 desa Tangguh Bencana yaitu : Desa Balorejo, Sidobunder, Karanggadung, Munggu, Peniron, Prigi, Watulawang, ayah, Kaligending, Tambakmulyo, tanggulangi, Sidomukti kec. Adimulyo, Sidomukti kec. Kuwarasan, Setrojenar dan Madurejo.
- d. Tersusun Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2013-2017.
- e. Gladi penanganan bencana tsunami di desa Karanggadung Petanahan dan desa Ayah kec ayah, serta gladi penanganan banjir di Adimulyo.

ii. Penanganan Darurat

Upaya Peningkatkan pelayanan dalam rangka tanggap darurat yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 26 kecamatan, Perangkat Daerah Terkait (DPU, SDA/ESDM, KODIM, POLRES) serta relawan (PMI dan ORARI).
- b. Pengembangan operasional PUSDALOPS dengan melaksanakan Absensi rutin TRC Kecamatan dan Perangkat Daerah terkait pada jam 20.00 WIB.
- c. Pengembangan POSKO Siaga Bencana pada saat darurat bencana di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kebumen.

iii. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pasca bencana melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, upaya yang telah dilaksanakan yaitu melalui Perbaikan, Pemulihan, Peningkatan dan Pembangunan yang lebih baik. Program dan kegiatan utama yang dilakukan antara lain :

- a. Koordinasi dan Fasilitasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Kebumen dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
- b. Pelatihan Teknis Penilaian *Damage and Losses Assesment (DALA)* yaitu melatih aparatur pemerintah penanggulangan bencana agar dapat melakukan perhitungan kerusakan dan kerugian akibat disertai dampak kerusakan dan kerugian.
- c. Pelatihan Recovery Mental, yaitu melatih aparat terbawah di tingkat desa dengan kemampuan dasar untuk memulihkan psikologi masyarakat yang sedang terkena bencana.

Kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen dalam 5 tahun renstra tahun 2011-2015, bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen

					Target Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	80%			4	4	4	4	4	1	1	1	2	4	25%	25%	25%	50%	100%
2	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>)	75%			36	37	34	51	50	18	23	21	20	25	50%	62%	62%	39%	50%
3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	85%			0	0	0	12	44	0	0	0	12	44	0%	0%	0%	100%	100%
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	90%			4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	100%	100%	100%	80%	100%

5	Besaran desa rawan air bersih yang terlayani		87%		83	83	83	83	83	74	74	74	74	74	89%	89%	89%	89%	89%
6	Besaran ragam logistic yang tersedia yang disalurkan kepada korban bencana		20%		17	17	17	17	17	10	12	12	13	13	59%	71%	71%	76%	76%
7	Jumlah kejadian kebakaran berbanding efisiensi waktu pemadaman		50%		36	37	34	51	50	18	23	21	20	25	50%	62%	62%	39%	50%
8	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah korban bencana		40%		150	150	150	150	150	43	83	77	99	88	29%	55%	51%	66%	59%

2. Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator kinerja Utama dalam Renstra 2010-2015, yang merupakan tolok ukur keberhasilan yang paling utama bagi BPBD Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang bertugas dalam menyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana yaitu :

- a. Besaran Desa rawan Air bersih yang terlayani;
- b. Besaran Ragam logistic yang tersedia yang disalurkan kepada korban bencana;
- c. Jumlah kejadian kebakaran berbanding efisiensi waktu pemadaman;
- d. Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial

Realisasi Pendanaan yang di pergunakan dalam rangka mencapai target Indikator kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam renstra 2010-2015 sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 2.4 Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama	Anggaran pada tahun ke-					Realisasi Anggaran pada tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata	
	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	Rp.000	%	%	%	%	%	Rp.000
Besaran Desa rawan Air bersih yang terlayani	154.000	164.000	174.000	184.000	194.000	153.546	213.563	262.093	209.582	361.987	100%	130%	151%	114%	187%	174.000	240.154
Besaran Ragam logistic tang tersedia yang disalurkan kepada korban bencana	575.000	645.000	740.000	835.000	980.000	207.080	231.221	426.667	415.910	575.386	36%	36%	58%	50%	59%	755.000	371.253
Jumlah kejadian kebakaran berbanding sfisiensi waktu pemadaman	85.000	130.000	150.000	150.000	200.000	104.154	137.040	128.492	134.006	123.730	123%	105%	86%	89%	62%	143.000	125.484
Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial	90.000	90.000	90.000	90.000	175.000	90.000	90.000	90.000	90.000	164.000	100%	100%	100%	100%	94%	107.000	104.800

3. Capaian sasaran Renstra Perangkat Daerah terhadap sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Renstra K/L.

Capaian sasaran renstra BPBD Kabupaten Kebumen dengan sasaran Perangkat Daerah provinsi (BPBD Provinsi Jawa Tengah) dan Kementerian/lembaga (BNPB dan Kemendagri) sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5.

Komparasi Capaian Renstra BPBD Kabupaten Kebumen terhadap sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta BNPB

NO	Indikator Kinerja (SPM/IKU)	Capaian Sasaran Renstra PERANGKAT DAERAH BPBD	Capaian Sasaran renstra PERANGKAT DAERAH Prov	Capaian Sasaran Renstra K/L
(1)		(3)	(4)	(5)
	SPM			
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota	4 WMK	0	0
2	Tingkat waktu tanggap	50%	-	-
3	Persentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	44 org	-	-
4	Jumlah mobil pemadam kebakaran diatas 3000 – 5000 liter pada WMK	5 unit	0	0
	IKU			
5	Besaran desa rawan air bersih yang terlayani	74 Ds/th	-	Jaringan air Wagirpandan, tendon air bersih

6	Besaran ragam logistik yang tersedia yang disalurkan kepada korban bencana	13 macam	0	Family KIT, Peralatan Dapur
7	Jumlah kejadian kebakaran berbanding efisiensi waktu pemadaman	25 kejadian	0	0
8	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan sosial dibagi jumlah korban bencana	88	5	0

4. Analisis terhadap Dokumen RT/RW.

Dalam dokumen RT/RW Kabupaten Kebumen dijelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Kebumen masuk ke dalam kawasan rawan bencana alam. Dalam pasal 27 Perda Kabupaten Kebumen nomor 23 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen tahun 2011-2031. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kebumen meliputi 7 (tujuh) kawasan rawan bencana, yaitu :

a. Banjir;

Kawasan rawan banjir di Kabupaten Kebumen terdapat di 16 wilayah kecamatan yaitu Ayah, Adimulyo, Kuwarasan, Puring, Gombong, Karanganyar, Sruweng, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Kebumen, Ambal, kutowinangun, Bonorowo dan prembun.

b. Tanah Longsor;

Kawasan rawan longsor di Kabupaten Kebumen terdapat di 12 wilayah kecamatan yaitu Rowokele, Sempor, Karanggayam, Krangsambung, Pejagoan, Sruweng, Sadang, Alian, Padureso, Karanganyar, Buayan dan Ayah.

c. Gelombang Pasang dan Tsunami;

Kawasan rawan gelombang pasang air laut dan tsunami di Kabupaten Kebumen meliputi 8 kecamatan yaitu Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong, Buluspesantren, Ambal dan Mirit.

d. Kekeringan;

Kawasan Kekeringan di Kebumen meliputi 7 wilayah kecamatan yaitu, Sruweng, Alian, Poncowarno, Karangsembung, Karanggayam, Padureso dan Sempor.

e. Angin kencang.

Kawasan rawan bencana angin topan meliputi 7 wilayah kecamatan yaitu, Ayah, Pejagoan, Adimulyo, Kuwarasan, Ambal, Buluspesantren dan Petanahan

f. Gempa Tektonik.

Kawasan rawan bencana gempa tektonik meliputi 6 wilayah kecamatan yaitu Sadang, Karanggayam, Rowokele, Sempor, buayan, dan Ayah.

Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa dengan banyaknya wilayah kecamatan yang merupakan daerah rawan bencana maka, pembangunan di wilayah tersebut harus selalu memperhatikan risiko yang bisa ditimbulkan. Beberapa upaya yang bisa ditempuh dalam rangka Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.6. Hasil Telaahan Pola Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen

NO	Rencana Pola Ruang	Pola Ruang saat ini	Indikasi Program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan	Pengaruh Rencana Pola Ruang terhadap kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
1	Kawasan Rawan Tsunami/Gelombang pasang	Kawasan Pantai saat ini dimanfaatkan sebagai Obyek wisata	Pengembangan pantai sebagai obyek wisata unggulan	Risiko terjadinya korban bencana semakin tinggi	Pembangunan Jalur Evakuasi
					Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana
					Peningkatan kewaspadaan dengan pembangunan

					Early warning System /EWS Tsunami
2	Kawasan Rawan Longsor	Perkembangan pemukiman Pembangunan	Masyarakat di kawasan rawan banjir, longsor, dan kekeringan tetap membangun rumah disebabkan Peningkatan ekonomi masyarakat dan keterbatasan pemilikan lahan	Risiko terjadinya korban bencana semakin tinggi	Pembangunan Sumur resapan di daerah rawan kekeringan
3	Kawasan Rawan Kekeringan	Pembangunan perumahan di daerah rawan banjir, longsor, dan kekeringan terus terjadi			Pengaturan Pembangunan rumah di daerah rawan longsor dan kekeringan
					Konservasi lahan di kawasan tangkapan air
4	Kawasan rawan Banjir				Normalisasi sungai dan Pengerukan Sedimentasi sungai

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Sebagai lembaga yang masih baru dibentuk pada tahun 2010, BPBD Kabupaten Kebumen pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Kebumen maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Kebumen harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Kebumen jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luas wilayahnya belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan system untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah :

1. Tingkat kesadaran masyarakat akan bencana masih sangat kurang, dilihat dari tingkat ketergantungan penanganan bencana kepada pemerintah masih sangat dominan;
2. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kebumen, khususnya pada saat belum terjadi bencana;
3. Pembinaan Desa Tangguh perlu ditingkatkan, dengan harapan kemandirian desa dalam penanggulangan bencana semakin meningkat;
4. Belum terintegrasi dan terstandarisasinya mekanisme/sistem pelaporan data dan informasi kebencanaan di Kabupaten Kebumen;
5. Fasilitas gedung yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan

- peralatan bencana sangat tidak memadai;
6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kebumen;
 7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kebumen;
 8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen;
 9. Belum memadainya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kebumen;
 10. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah.

Hasil Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Aspek Kajian	Capaian/Kon disisi Saat ini	Standar yang diguna-kan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Perangkat Daerah
			Internal	Eksternal	
			Kewenang an Perangkat Daerah	Diluar Kewenang an Perangkat Daerah	
Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	Pemberian bantuan darurat untuk perbaikan infrastruktur dan pemberian logistik	-	Dukungan APBD yang selalu teralokasi kan	Swadaya desa dalam penangan infrastruktur di desa	
Kajian Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah terhadap renstra BPBD kabupaten dan Renstra K/L	Pembentuka n Desa Tangguh Bencana	IKU	Dukungan Anggaran tercukupi	Dukungan APBDesa juga memungki nkan.	Fasilitator Desa tangguh Bencana perlu di tingkatkan kapasitasnya
Kajian Renstra Terhadap Hasil Telaahan Dokumen RT/RW	Kejadian banjir, longsor semakin meningkat	Perda RT/RW nomor 23 th 2012	-	Pembangu nan pemukima n penduduk tidak memperti mbangkan	Permintaan Bantuan logistik bencana semakin meningkat

				risiko bencana	
Kajian Renstra terhadap Hasil Analisa Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Kebumen 2010-2015	Hutan di Kawasan Hulu sungai perlu dilakukan konservasi lahan tangkapan air	Dokumen KLHS 2010	-	Penebangan Pohon di daerah tangkapan air	Desa terdampak kekeringan semakin bertambah

B. Identifikasi Isu-isu Strategis

Penerapan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kebumen tentu saja tidak terlepas dari perkembangan lingkungan eksternal baik lokal/regional, nasional maupun internasional. Isu-isu strategis eksternal terkait penanggulangan bencana sebagai berikut :

Tabel 3.2. Identifikasi Isu-isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional	Lain-lain
	Kesepakatan di tingkat global yang mengusung konsep pengurangan risiko bencana seperti Hygo Framerwork for Action 2005 - 2015 yang dilanjutkan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030.	1.Semangat nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan.	Diundangkannya perda : 1.Perda No.4 th 2014 tentang Penanggulangan Bencana di kab. Kebumen.	1. Perda RT/RW dan Dokumen KLHS belum dilaksanakan dengan baik, terkait Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana. 2. Dunia Usaha memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana melalui CSR

Arah kebijakan penanggulangan bencana dalam RPJMN 2015-2019 diarahkan untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan

ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sasarannya adalah “Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi”. Komitmen sebagai tindak lanjut PRB (Pengurangan Risiko Bencana) dalam pembangunan nasional telah diwujudkan dalam RPJMN 2015-2019 dengan memuat esensi investasi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia.

Perwujudan yang mendasar adalah membangun kemitraan dan kerjasama oleh semua pihak untuk mewujudkan ketangguhan di tingkat masyarakat dengan memperhatikan dimensi degradasi lingkungan dan perubahan iklim. Semangat ditataran global telah dicerminkan dalam Konfensi Dunia PRB ke-3 di Sendai yang dinaungi oleh Badan PBB untuk Pengurangan Risiko Bencana. Indonesia telah menyampaikan tantangan terkait dengan tata kelola dalam kebencanaan dengan semakin meningkatkan berbagai permasalahan pembangunan di era saat ini.

Tantangan berupa upaya pengurangan kemiskinan, kerusakan lingkungan, urbanisasi, air bersih, serta isu perubahan iklim dengan kejadian kebencanaan yang semakin meningkat. Indonesia telah berupaya dengan meletakkan peraturan perundangan terkait dengan bencana, kelembagaan kebencanaan dari tingkat nasional hingga daerah, perencanaan kebencanaan, menjalin kemitraan dengan berbagai multi pihak di bidang bencana, dan membangun ketangguhan dari kepemimpinan dan keterlibatan secara inklusif untuk tata kelola kebencanaan di Indonesia. Tantangan yang cukup besar adalah sebagai “Negara Kepulauan” yang berwawasan Nusantara, pemanfaatan modal budaya dan sosial menjadi penting dalam tata kelola kebencanaan. Hal ini masuk dalam dokumen SFDRR 2015-2030 yang ditetapkan sebagai Negara kepulauan menjadi karakteristik yang spesifik, karena memiliki risiko dan tantangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Negara-negara daratan.

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, dengan melibatkan unit perangkat daerah lainnya, masyarakat dan dunia usaha.

Peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merupakan sejarah baru dalam penanganan bencana di Indonesia. setelah diberlakukannya undang-undang ini paradigma penanggulangan bencana menjadi semakin luas yaitu penanganan pada masa prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
 2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
- C. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021 sangat dipengaruhi oleh kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana di kabupaten Kebumen

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi : <i>BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN</i>				
No	Misi dan Program Bupati & Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
I	Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan gudang untuk menampung logistik yang bersumber dari pengadaan sendiri, hibah dari Provinsi dan BNPB serta bantuan masyarakat sangat tidak memadai.	Terbatasnya lahan yang ada di BPBD kabupaten Kebumen	Tingginya animo masyarakat dan dunia usaha dalam memberikan bantuan berupa barang kepada pemerintah dalam penanggulangan bencana
II	<u>Misi 2</u> : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat.			
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Keterbatasan SDM untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana. 2. Sinergitas Perangkat Daerah terkait dalam penanggulangan Bencana belum terjalin dengan baik	Masyarakat belum mendukung kegiatan Pengurangan Risiko bencana	Keterpaduan Program pembangunan di Perangkat Daerah terkait yang memiliki peran dalam Pengurangan risiko bencana sudah diatur dalam undang-undang (pasal 6 UU 24 tahun 2017)

D. Penentuan Isu-Isu Strategis.

Berdasarkan identifikasi Isu-isu strategis yang sedang berkembang di tingkat Internasional, nasional, dan regional maka apabila di kaitkan dengan Pelaksanaan pelayanan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen bisa disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hal penyediaan SDM, dalam rangka penanggulangan bencana, terutama dalam hal mitigasi bencana diperlukan adanya pegawai yang

memiliki kemampuan dalam merencanakan upaya pengurangan risiko bencana melalui pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan yang ada di dalam masyarakat serta perkembangan aturan perundang-undangan.

2. Pada Kondisi Pra bencana.

- a. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Kebumen yang mengukung upaya pengurangan risiko bencana (PRB) belum terintegrasi dengan baik.
- b. Penataan kawasan Rawan Bencana sesuai RT/RW dan KHLS belum terlaksana dengan baik.
- c. Pengembangan kawasan pantai selatan Kabupaten Kebumen dengan pembangunan jalan JLSS dan pengembangan industri pariwisata pantai akan semakin meningkatkan aktivitas perekonomian, baik industri, pariwisata, maupun perumahan/pemukiman semakin memperbesar risiko bencana Tsunami.
- d. Kesadaran masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dalam rangka turut serta melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana secara mandiri, masih rendah, terutama di daerah yang rawan longsor.

2. Pada Kondisi Terjadi Bencana/Darurat Bencana.

- a. Kewenangan Kepala BPBD untuk mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik yang ada pada instansi/lembaga, dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.
- b. Kepala BPBD mengkoordinasikan upaya pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana.

3. Pada Kondisi Pasca Bencana

- a. Dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemerintah daerah wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD.
- b. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditetapkan dengan skala prioritas dan didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Visi.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen untuk periode 2016-2021, yaitu dengan Visi : **“BERSAMA MENUJU MASYARAKAT KEBUMEN YANG SEJAHTERA, UNGGUL, BERDAYA, AGAMIS DAN BERKELANJUTAN”**. Terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen, maka visi ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Sejahtera** mengandung arti bahwa di masa yang akan datang masyarakat Kabupaten Kebumen akan semakin sejahtera yaitu semakin meningkatnya upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana sehingga aktifitas perekonomian di daerah rawan bencana semakin meningkat.
2. **Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan** mengandung arti bahwa masyarakat kebumen semakin tangguh dan memiliki kemampuan dan kemauan untuk secara dini dalam menghadapi permasalahan bencana yang ada, serta dengan selalu mengedepankan upaya pengurangan risiko bencana secara berkesinambungan.

B. Misi

Dalam rangka mendukung pencapaian visi bupati terpilih, BPBD Kabupaten Kebumen menitikberatkan pada pelaksanaan misi bupati sebagai berikut :

1. Melaksanakan misi ke-2 bupati yaitu : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
2. Melaksanakan misi ke-6 Bupati yaitu : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, professional, transparan dan akuntabel yang di

3. dukung dengan sistim pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati terpilih maka BPBD Kabupaten Kebumen telah menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1 Target Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus	Satuan	Kondisi Saat ini (2015)	Target Kinerja Pada Tahun						Kondisi akhir RPJMD (2021)
							2016	2017	2018	2019	2020	2021	
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Meningkatnya cakupan pelayanan BPBD kabupaten Kebumen serta kemandirian desa/masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Peningkatan Kapasitas dan lembaga BPBD kabupaten Kebumen serta masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana Terbentuk	$(\text{Jumlah desa tangguh bencana} / \text{Jumlah desa rawan bencana}) \times 100\%$	%	2,8 %	10%	17,14 %	24,29%	31,43%	38,57 %	45,71 %	45,71%

Jumlah Desa Rawan Bencana 210 desa

Sumber data (Bid I BPBD Kab. Kebumen)

D. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi Bupati terpilih, maka BPBD Kabupaten Kebumen menetapkan strategi dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.3. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.			
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Kebumen	Peningkatan capaian kinerja pelayanan lembaga dan aparatur pada BPBD Kabupaten Kebumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM BPBD 2. Menjaga ketersediaan SarPras Penanggulangan Bencana. 3. Menyediakan data informasi kebencanaan yang valid. 4. Mensinergikan program pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait 5. Menjamin pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana. 6. Melibatkan Dunia Usaha untuk turut melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara rutin. 2. Memelihara Kondisi Sarpras Penanggulangan Bencana dalam kondisi baik 3. Menyediakan Data Base Bencana 4. Mendorong adanya pengarusutamaan PRB dalam Kegiatan Perangkat Daerah Terkait 5. Memberikan pelayanan penanggulangan bencana 6. Bekerjasama dengan Dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana
Misi 2 : Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik			

dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat

Mewujudkan Kabupaten Kebumen yang Tangguh Bencana	Peningkatan kapasitas lembaga BPBD Kabupaten Kebumen serta Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajak Masyarakat untuk lebih mengutamakan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana untuk meminimalisir timbulnya korban 2. Menjamin ketersediaan Bantuan logistik kebencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Daerah Rawan Bencana. 2. Menyediakan Sistem peringatan dini bencana yang memadai. 3. Menjalin hubungan baik dengan organisasi relawan 4. Menyediakan logistik kebencanaan yang dibutuhkan dalam Penanggulangan Bencana
	Berfungsinya kembali infrastruktur / Sararana dan prasarana umum dan perumahan yang rusak akibat bencana serta pemuliahan dampak yang ditimbulkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sarana dan prasarana umum masyarakat dan perumahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan perbaikan sarana dan prasarana umum/ infrastruktur serta perumahan 2. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dalam rangka melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan penjabaran teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Kebumen sebagai pelaksana, koordinasi dan komando dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Kebumen.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Kebumen dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program/Kegiatan serta pendanaan indikatif yang direncanakan guna mendukung pencapaian indikator sasaran strategis yang ada di BPBD Kabupaten Kebumen dalam Renstra tahun 2016-2021 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BPBD KAB. KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja akhir Periode Renstra SKPD		Lokasi		
								Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)						
								TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)	TARGET	Rp (.000,-)		TARGET	Rp (.000,-)
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah / (Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik)	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	Prosentase capaian kinerja pelayanan SKPD	Jml prosentase capaian seluruh program / jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	%		90 %		91 %		93 %		94 %		95 %		96 %		96 %				
				Program Pelayanan Administrasi perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran																			
				Penyediaan jasa Surat Menyurat	tersedianya perangkat & materai	bulan		12	4.500	12	4.900	12	5.400	12	5.900	12	6.400	12	7.000	72	34.100			
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik dan faximili/internet kantor	bulan		12	45.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	66.000	12	72.600	72	348.600			
				Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	bulan		12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	66.000	12	75.000	12	80.000	72	386.000			

				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	bulan		12	450.000	12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	660.000	12	730.000	72	3.490.000	
				Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan		12	70.000	12	75.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	12	95.000	72	495.000	
				Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	bulan		12	38.500	12	40.000	12	45.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	72	288.500	
				Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan		12	49.500	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	72	374.500	
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan		12	33.000	12	36.000	12	40.000	12	44.000	12	48.000	12	53.000	72	254.000	
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan	bulan		12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.300	12	14.600	12	16.100	72	77.000	
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	4.000	12	4.400	12	4.800	12	5.300	12	5.800	12	6.400	72	30.700	
				Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat-rapat dinas	bulan		12	30.000	12	33.000	12	36.000	12	40.000	12	44.000	12	48.300	72	231.300	

				Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	bulan		12	200.000	12	220.000	12	242.000	12	266.000	12	293.000	12	322.000	72	1.543.000	
				Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	100.000	12	110.000	12	121.000	12	133.000	12	146.000	12	161.000	72	771.000	
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang memadai				672.000		1.681.700		1.077.200		1.619.400		1.301.500		1.265.500	-	7.617.300	
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	unit	32	6	400.000	4	1.500.000	2	750.000	2	1.400.000	2	900.000	1	1.000.000	17	5.950.000	
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit		1	27.000	1	29.700	1	32.700	1	35.900	1	39.500	1	43.500	6	208.300	
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit		1	70.000	1	77.000	1	85.000	1	93.000	1	102.000	1	112.000	6	539.000	
				Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPBD	paket		4	70.000	4	75.000	4	82.000	4	90.500	4	100.000	4	110.000	24	527.500	
				Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor (Meja kursi kerja, almari, filing cabinet, sofa dll)	unit		47	100.000	-	-		120.000	-	-		150.000	-	-	47	370.000	

				Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubelair kantor	unit			5.000	-	-		7.500	-	-		10.000	-		-	22.500	
				Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik daerah	Tersedianya dokumen data statistik terkait kebencanaan	dok		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	6	60.000	
				Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya Data base tahunan SKPD	dok		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	6	60.000	
				Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan dibidang kebencanaan	dok		2	28.000	2	20.000	2	20.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	12	143.000	
				Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasinya	dok		2	28.000	2	20.000	2	20.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	12	143.000	
				Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas pegawai	orang		34	115.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	94	415.000	
				Pendidikan dan pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas PNS dan THL	orang		34	115.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	94	415.000	
Menciptakan masyarakat yang tenteram dan	Meningkatnya Indeks Ketenteraman Sosial	Terwujudnya masyarakat yang	Persentase desa Siaga/Ta	Jumlah Desa Tangguh bencana / jumlah desa	Prosentase Desa Tangguh Bencana	%	5,24	8,1		10,9		13,8		17,1		20,9		25,2		25,2		

				Pelatihan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya peningkatan kapasitas masyarakat/relawan dalam penanggulangan bencana	orang		50	100.000	80	110.000	60	120.000	60	125.000	60	130.000	60	135.000	370	720.000	
				pembentukan ds tangguh bencana	Meningkatnya kesadaran dan kemandirian ds dalam penanggulangan bencana.	desa	15 desa dari 210 desa	6	192.755	6	380.000	8	415.000	8	455.000	8	495.000	9	540.000	45	2.477.755	
				Sekolah Aman Bencana	Terciptanya pemahaman kebencanaan secara dini	sekolah		-	-	5	150.000	5	155.000	5	160.000	5	170.000	5	175.000	25	810.000	
				Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	Terlaksananya pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	orang		-	-	60	75.000	60	80.000	60	85.000	60	90.000	60	95.000	300	425.000	
				Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Tersusunnya Dokumen RPB periode 4 tahunan	dokumen	-	-	-	1	50.000							1	60.000	2	110.000	
					Tersusunnya Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana	dokumen		-	-	1	50.000	1	50.000	1	60.000	-	-	1	70.000	4	230.000	
				Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Terlaksananya koordinasi PRB antar lembaga/skpd terkait bencana	kali				3	20.000	3	20.000	3	25.000	3	25.000	3	25.000	15	115.000	

					Terlaksananya koordinasi antar Relawan Penanggulangan Bencana	kali				2	85.000	2	90.000	2	95.000	2	100.000	2	100.000	10	470.000	
		Optimalisasi penanganan bencana untuk menjaga ketentraman masyarakat di wilayah bencana	Prosentase penanganan bencana pada sektor infrastruktur, Perumahan/Pemukimam, Ekonomi Pruduktif, sosial dan lintas sektor	Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	paket		7	10.582.036	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	20.582.036	
				Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan pascabencana	paket		7	10.582.036	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	20.582.036	
				Program Pengendalian Banjir	Berfungsinya kembali secara normal tebing sungai yang rusak akibat bencana	paket		7	3.812.135	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	13.812.135	
				Pembangunan Infrastruktur pengairan pasca bencana alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi tebing Sungai pascabencana	paket		7	3.812.135	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	13.812.135	
				Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Banyaknya rumah yang mendapat bantuan perbaikan pasca bencana	paket		1	200.000	1	220.000	1	242.000	1	266.200	1	292.820	100	322.102	600	1.543.122	
				Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Terlaksananya pemberian bantuan material perbaikan	rumah		100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	292.820	100	322.102	600	1.543.122	

				rumah akibat bencana																		
				Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis akibat bencana dan bantuan logistik korban bencana	bulan		12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.550.000	12	2.600.000	12	2.650.000	12	2.700.000	72	15.000.000	
				penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis dan tanggap darurat bencana	keg		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	72	12.000.000	
				Penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana alam/kebakaran dan penanganannya	Tersedianya kebutuhan bantuan logistik bagi korban bencana alam dan kebakaran serta logistik kerjabakti penanganan bencana			-		12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	650.000	12	700.000	60	3.000.000	
				Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Operasional kesiapsiagaan penanganan bencana	bulan		12	937.200	12	100.000	12	100.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	1.887.200	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam rangka mencapai salah satu tujuan pembangunan yaitu Menciptakan masyarakat yang tentram dan tertib melalui kepastian hukum, perlindungan dan penegakan hukum seperti yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2016-2021, maka setiap Perangkat Daerah memiliki tugas untuk turut serta dalam mencapai tujuan pembangunan tersebut, yang telah ditetapkan indikator kinerjanya. Peran serta BPBD Kabupaten Kebumen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD, salah satunya melalui program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam, melalui kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana.

Kegiatan Pembentukan Desa Tangguh Bencana ini dimaksudkan untuk menjadikan desa memiliki ketangguhan dalam menanggulangi bencana, baik pada masa PraBencana melalui pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan, pada masa tanggap darurat bencana melalui mobilisasi relawan di tingkat desa manakala terjadi bencana maupun pada masa pasca bencana. Kegiatan ini juga mengandung maksud untuk menumbuhkan kemandirian desa dalam rangka penanggulangan bencana di wilayah masing-masing.

Rencana pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang mendukung Pencapaian IKU Daerah
dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target kinerja pada tahun						Kondisi akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	5,23 % (17 desa)	8,1%	10,9%	13,8%	17,1%	20,9%	25,2	25,2%
2	Prosentase capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%

BAB VII PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 ini ditambahkan program dan kegiatan tahun 2016 yang sudah dilaksanakan pada masa transisi sebelum RPJMD tahun 2016-2020 disahkan, serta ditambahkan program/kegiatan tahun 2021 untuk dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah pada saat transisi penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah berikutnya.

B. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 ini adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama lima tahun ke depan. Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pihak (pimpinan, staf dan para pemangku kepentingan terkait). Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra ini, setiap tahun perlu dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi terhadap muatan Renstra ini, termasuk revisi indikator kinerjanya dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen ini juga menjadi dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan. Untuk itu, semua unit kerja yang ada di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen harus melaksanakan secara sungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

LAMPIRAN

BERITA ACARA
RAPAT KONSULTASI PUBLIK PENYUSUNAN RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

Pada hari Senin tanggal 5 Desember tahun 2016 telah diselenggarakan Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

- a. Pemaparan materi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen oleh Bapak Drs. Eko Widiyanto (Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen).
- b. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta rapat Konsultasi Publik Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen, maka pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 5 Desember 2016.

J a m : 12.30 WIB

Tempat : Ruang Aula BPBD Kabupaten Kebumen

Rapat Konsultasi Publik Renstra BPBD Kabupaten Kebumen :

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) SKPD, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan rancangan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berita acara ini.
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.

KETIGA : Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini.

KEEMPAT : Berita acara ini beserta lampiran sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renstra SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 5 Desember 2016

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kebumen

Drs. EKO WIDIANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630413 198607 1 001

Mewakili Peserta Rapat Konsultasi Publik Penyusunan Renstra Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kebumen

NO	Nama	Lembaga/ instansi	Jabatan/Alamat	Tanda Tangan
1.				
2.	Bambang Wijanarko	SAR ELANG	Ketua	
3.	PUJIONO	Kec. AMBAL	Kasi Trantib	
4.	Joko Tri Atmoko	BAPPEDA	Staf	

Tabel.T-IV.C.31

Rekapitulasi Hasil Pembahasan Kelompok Forum SKPD BPBD Kab. Kebumen terhadap Isu Strategis, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Renstra SKPD BPBD Kab. Kebumen Tahun 2016-2021 Kabupaten Kebumen

<p>Isu Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan di tingkat global yang mengusung konsep pengurangan risiko bencana seperti Hygo Framerwork for Action 2005 - 2015 yang dilanjutkan menjadi Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030. 2. Semangat nawacita dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, dalam rangka menurunkan indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan. 3. Bencana dan Kebakaran telah menjadi urusan wajib terkait pelayanan dasar Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan dimaksud sesuai dengan pasal 12 ayat (1) UU 23/2014. 4. Perda No.4 th 2014 tentang Penanggulangan Bencana di kab. Kebumen. 5. Perda No.1 Th 2016 tentang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kab. Kebumen 6. Perda RT/RW dan Dokumen KLHS belum dilaksanakan dengan baik, terkait Pembangunan pada Daerah Rawan Bencana. 7. Dunia Usaha memiliki kewajiban untuk turut berperan dalam penanggulangan bencana melalui CSR 			
<p>Visi : Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis dan Berkelanjutan.</p>			
<p>Misi I : Menjalankan misi ke 6 Bupati yaitu :</p> <p>Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
<p>Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif</p>	<p>Peningkatan capaian kinerja pelayanan lembaga dan aparatur pada BPBD Kabupaten Kebumen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kapasitas SDM BPBD . 2. Menjaga ketersediaan SarPras Penanggulanga n Bencana. 3. Menyediakan data informasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan secara rutin. 2. Memelihara Kondisi Sarpras Penanggulanga n Bencana dalam kondisi

		kebencanaan yang valid. 4. Mensinergikan program pembangunan dalam rangka penanggulangan bencana pada perangkat daerah terkait 5. Menjamin pemenuhan kebutuhan penanggulangan bencana. 6. Melibatkan Dunia Usaha untuk turut melaksanakan Kegiatan Penanggulangan Bencana.	baik 3. Menyediakan Data Base Bencana. 4. Mendorong adanya pengarusutamaan PRB dalam Kegiatan Perangkat Daerah Terkait. 5. Memberikan pelayanan penanggulangan bencana. 6. Bekerjasama dengan Dunia usaha dalam rangka penanggulangan bencana
--	--	---	---

Misi 2 :

Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat, dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan, untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya, serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik, berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya, dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat

Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, peningkatan ahlak	Peningkatan kapasitas lembaga BPBD Kabupaten Kebumen serta Masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana	1. Mengajak Masyarakat untuk lebih mengutamakan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana untuk meminimalisir timbulnya korban. 2. Menjamin ketersediaan Bantuan Logistik	1. Pembentukan Desa Tangguh Bencana pada Daerah Rawan Bencana. 2. Menyediakan Sistem peringatan dini bencana yang memadai. 3. Menjalin hubungan baik dengan organisasi relawan. 4. Menyediakan
--	---	--	---

		kebencanaan	logistik kebencanaan yang dibutuhkan dalam Penanggulanga n Bencana
	Berfungsinya kembali infrastruktur dan perumahan pasca bencana	1. Mensinergikan penanganan pasca bencana antar Perangkat Daerah di dalam internal Pemda Kabupaten Kebumen dengan Provinsi dan Nasional	1. Berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam penanganan kerusakan infrastruktur pasca bencana. 2. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam rangka melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian yang diakibatkan bencana.

Tabel.T-IV.C.32
 Program dan Kegiatan Prioritas Renstra SKPD BPBD Kab. Kebumen Tahun 2016-2021
 Kabupaten Kebumen

Program dan Kegiatan	Indikator kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2015)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi kinerja akhir Periode Renstra SKPD		Lokasi
				Tahun-1 (2016)		Tahun-2 (2017)		Tahun-3 (2018)		Tahun-4 (2019)		Tahun-5 (2020)		Tahun-6 (2021)				
				Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	Target	Rp (.000,-)	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Jml prosentase capaian seluruh program / jumlah program	Prosentase capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	%		90%		91%		93%		94%		95%		96%		96%		
Penyediaan jasa Surat Menyurat	tersedianya perangkat & materai	bulan		12	4.500	12	4.900	12	5.400	12	5.900	12	6.400	12	7.000	72	34.100	
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air dan listrik	tersedianya kebutuhan telepon, air, listrik dan faximili/internet kantor	bulan		12	45.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	66.000	12	72.600	72	348.600	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya pemeliharaan peralatan & perlengkapan kantor	bulan		12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	66.000	12	75.000	12	80.000	72	386.000	

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	bulan		12	450.000	12	500.000	12	550.000	12	600.000	12	660.000	12	730.000	72	3.490.000	
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	bulan		12	70.000	12	75.000	12	80.000	12	85.000	12	90.000	12	95.000	72	495.000	
Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya kebutuhan peralatan dan bahan kebersihan kantor	bulan		12	38.500	12	40.000	12	45.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	72	288.500	
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	bulan		12	49.500	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	12	75.000	72	374.500	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan		12	33.000	12	36.000	12	40.000	12	44.000	12	48.000	12	53.000	72	254.000	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik / penerangan	bulan		12	10.000	12	11.000	12	12.000	12	13.300	12	14.600	12	16.100	72	77.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bulan		12	4.000	12	4.400	12	4.800	12	5.300	12	5.800	12	6.400	72	30.700	

Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat-rapat dinas	bulan		12	30.000	12	33.000	12	36.000	12	40.000	12	44.000	12	48.300	72	231.300	
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat dan koordinasi keluar daerah	bulan		12	200.000	12	220.000	12	242.000	12	266.000	12	293.000	12	322.000	72	1.543.000	
Rapat -rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	Terpenuhinya biaya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	bulan		12	100.000	12	110.000	12	121.000	12	133.000	12	146.000	12	161.000	72	771.000	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bertambahnya dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang memadai				672.000		1.681.700		1.077.200		1.619.400		1.301.500		1.265.500	-	7.617.300	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	unit	32	6	400.000	4	1.500.000	2	750.000	2	1.400.000	2	900.000	1	1.000.000	17	5.950.000	
Pengadaan perlengkapan gedung kantor.	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit		1	27.000	1	29.700	1	32.700	1	35.900	1	39.500	1	43.500	6	208.300	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit		1	70.000	1	77.000	1	85.000	1	93.000	1	102.000	1	112.000	6	539.000	
Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor BPBD	paket		4	70.000	4	75.000	4	82.000	4	90.500	4	100.000	4	110.000	24	527.500	

Pengadaan mebeleur	Tersedianya meubelair kantor (Meja kursi kerja, almari, filing cabinet, sofa dll)	unit		47	100.000	-	-		120.000	-	-		150.000	-	-	47	370.000	
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya meubelair kantor	unit			5.000	-	-		7.500	-	-		10.000	-	-		22.500	
Program Pengembangan Data/Informasi /Statistik daerah	Tersedianya dokumen data statistik terkait kebencanaan	dok		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	6	60.000	
Penyusunan dan pengumpulan data statistik daerah	Tersusunnya Data base tahunan SKPD	dok		1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	6	60.000	
Program Pengembangan Data/Informasi	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan dibidang kebencanaan	dok		2	28.000	2	20.000	2	20.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	12	143.000	
Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasinya	dok		2	28.000	2	20.000	2	20.000	2	25.000	2	25.000	2	25.000	12	143.000	

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Meningkatnya kapasitas pegawai	orang		34	115.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	94	415.000	
Pendidikan dan pelatihan Formal	Peningkatan kapasitas PNS dan THL	orang		34	115.000	12	50.000	12	55.000	12	60.000	12	65.000	12	70.000	94	415.000	
Jumlah Desa Tangguh bencana / jumlah desa rawan bencana x 100%	Prosentase Desa Tangguh Bencana	%	5,24	8,1		10,9		13,8		17,1		20,9		25,2		25,2		
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Terwujudnya desa yang mandiri dalam pencegahan dan penanggulangan korban bencana																	
Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam	Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebencanaan melalui media, sosialisasi	keg		4	200.000	4	300.000	4	320.000	4	341.500	4	369.650	4	394.615	24	1.925.765	

Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	tersedianya sarparas penyelamatan korban bencana dan perlindungan diri	paket		1	100.000	1	110.000	1	121.000	1	133.100	1	146.410	1	161.051	6	771.561	
Pelatihan bagi aparat/SAR dalam penanganan bencana alam	Terlaksananya pelatihan Assasment kerugian akibat bencana	orang		100	120.000	60	80.000	60	88.000	60	96.800	60	106.480	60	117.128	400	608.408	
Penyusunan Peta Resiko Rawan Bencana	Tesedianya Data Peta kecamatan resiko rawan bencana	peta	4	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	4	100.000	24	600.000	
Droping air bersih	Terpenuhinya kebutuhan air bersih di daerah rawan kekeringan	tangki		1.540	300.000	4.000	700.000	4.000	700.000	4.000	700.000	4.000	700.000	4.000	700.000	21.540	3.800.000	
Pelatihan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pelatihan pemulihan trauma Psikologis pasca Bencana	keg	2 x	1	100.000	1	110.000	1	120.000	1	125.000	1	130.000	1	135.000	6	720.000	
pembentukan ds tangguh bencana	Meningkatnya kesadaran dan kemandirian ds dalam penanggulangan bencana.	desa	15 desa dari 210 desa	6	192.755	6	380.000	8	415.000	8	455.000	8	495.000	9	540.000	45	2.477.755	
Sekolah Aman Bencana	Terciptanya pemahaman kebencanaan secara dini	sekolah		-	-	5	150.000	5	155.000	5	160.000	5	170.000	5	175.000	25	810.000	

Pelatihan teknis penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana	Terlaksananya pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana	orang		-	-	60	75.000	60	80.000	60	85.000	60	90.000	60	95.000	300	425.000	
Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan kawasan rawan bencana	Tersusunnya Dokumen RPB periode 4 tahunan	dokumen	-	-	-	1	50.000							1	60.000	2	110.000	
	Tersusunnya Rencana Kontingensi Penanggulangan Bencana	dokumen		-	-	1	50.000	1	50.000	1	60.000	-	-	1	70.000	4	230.000	
Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB)	Terlaksananya koordinasi PRB antar lembaga/skpd terkait bencana	kali				3	20.000	3	20.000	3	25.000	3	25.000	3	25.000	15	115.000	
	Terlaksananya koordinasi antar Relawan Penanggulangan Bencana	kali				2	85.000	2	90.000	2	95.000	2	100.000	2	100.000	10	470.000	
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Berfungsinya kembali jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana	paket		7	10.582.036	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	20.582.036	

Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi jalan dan pascabencana	paket		7	10.582.036	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	20.582.036	
																-	-	
Program Pengendalian Banjir	Berfungsinya kembali secara normal tebing sungai yang rusak akibat bencana	paket		7	3.812.135	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	13.812.135	
Pembangunan Infrastruktur pengairan pasca bencana alam	Terlaksananya rehabilitasi dan rekonstruksi tebing Sungai pascabencana	paket		7	3.812.135	5	1.000.000	8	1.500.000	8	2.000.000	10	2.500.000	10	3.000.000	48	13.812.135	
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Banyaknya rumah yang mendapat bantuan perbaikan pasca bencana	rumah		100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	292.820	100	322.102	600	1.543.122	
Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	Terlaksananya pemberian bantuan material perbaikan rumah akibat bencana	rumah		100	200.000	100	220.000	100	242.000	100	266.200	100	292.820	100	322.102	600	1.543.122	

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Masalah Sosial	tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis akibat bencana dan bantuan logistik korban bencana	bulan		12	2.000.000	12	2.500.000	12	2.550.000	12	2.600.000	12	2.650.000	12	2.700.000	72	15.000.000	
penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	tersedianya kebutuhan penanganan masalah strategis dan tanggap darurat bencana	keg		12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	72	12.000.000	
Penyediaan bantuan logistik bagi korban bencana alam/kebakaran dan penanganannya	Tersedianya kebutuhan bantuan logistik bagi korban bencana alam dan kebakaran serta logistik kerjabakti penanganan bencana	paket		10		2	500.000	2	550.000	2	600.000	2	650.000	2	700.000	10	3.000.000	
Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Operasional kesiapsiagaan penanganan bencana	bulan		12	937.200	12	100.000	12	100.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	1.887.200	

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran
dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021

No	Indikator Kinerja	Kondisi Awal (2015)	Target kinerja pada tahun						Kondisi akhir RPJMD
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Persentase desa Siaga/Tangguh Bencana	5,24%	8,10%	10,95%	13,81%	17,14 %	20,95 %	25,24 %	25,24 %
2	Prosentase capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%	96%